

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persatuan dan kesatuan bangsa yang dimanipulasikan kedalam suatu wawasan nasional yaitu merupakan cara pandang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan latar belakang sejarah dan kondisi Sosial Budaya serta pemanfaatan konstelasi kekuatan masyarakat yang ada guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai tujuan pembangunan mulai memudar setelah terjadinya berbagai perubahan system pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Didalam RENSTRA tersebut memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan SKPD.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 2013-2018 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Palangka Raya, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Kota Palangka Raya. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan program dan kegiatan yang akan disusun nantinya bisa terarah dan tepat sasaran sesuai dengan yang telah ditargetkan.

1.2 Landasan Hukum

1. Landasan idiil : Pancasila.
2. Landasan konstitusional : Undang-undang Dasar 1945.
3. Landasan operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - f. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah.
 - g. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- a. Penjabaran Visi dan Misi
- b. Sebagai pedoman penyusunan Arah Kebijakan Umum dan Program Kerja Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya setiap Tahun Anggaran.
- c. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya dalam upaya meningkatkan kualitas Wawasan Kebangsaan dan politik.
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 2013-2018 adalah:

- a. Meningkatkan kondisi sumber daya masyarakat termasuk kondisi Sosial Politik melalui Aparatur Profesional.
- b. Terciptanya peningkatan kinerja dalam pemberdayaan potensi masyarakat Sosial Politik.
- c. Menciptakan komitmen dan konsistensi terhadap peran Sumber Daya Masyarakat/ Sosial Politik sebagai pendukung utama pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam menyusun Rencana Strategis ini adalah dengan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu antara lain pengumpulan data, pengolahan

data dan penyusunan Rencana Strategis. Dalam melaksanakan tahapan-tahapan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya melakukan koordinasi baik internal maupun external dengan melibatkan berbagai pihak sehingga diharapkan data yang didapat nantinya merupakan data-data yang riil sesuai dengan kondisi sekarang dan yang akan datang.

Setelah melalui semua tahapan diatas, maka Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaah RENSTRA

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA**

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai Tugas Pokok merumuskan kebijakan operasional badan, mengendalikan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dibidang kesatuan bangsa, integrasi bangsa dan perlindungan masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Fungsi

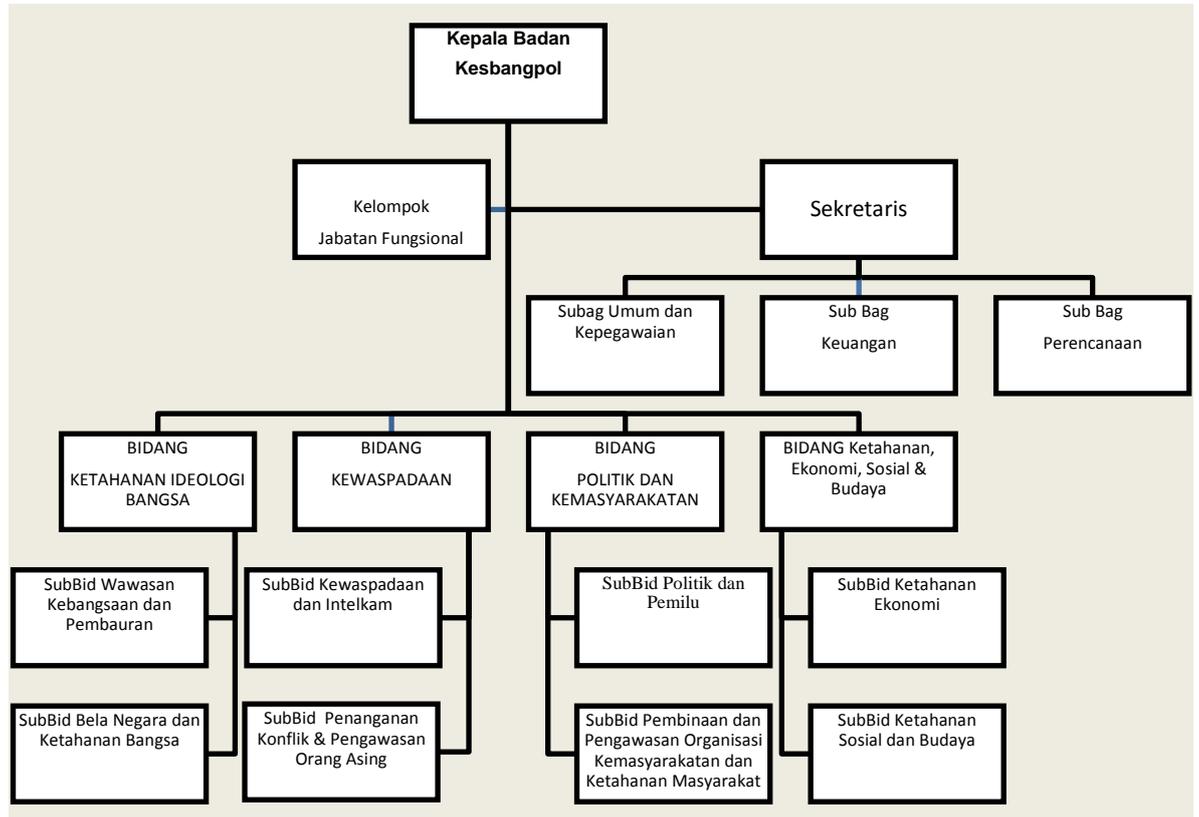
Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya terdiri dari :

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dan pengkajian masalah bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- b. Membina, mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Merumuskan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pembinaan budaya politik;
- e. Merumuskan penyiapan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;

- h. Merumuskan kebijakan dan fasilitas peningkatan SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.3. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA**



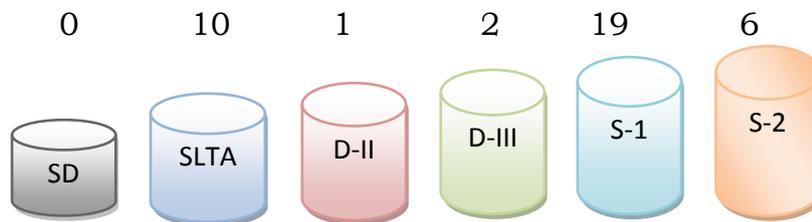
2.2. Sumber Daya SKPD

Manusia sebagai makhluk Individu sekaligus Mahluk sosial berpotensi untuk melakukan berbagai perilaku yang berdimensi Politik, Ekonomi dan Kultural yang dinamis, sehingga perlu diantisipasi kearah iklim kondusif yang menguntungkan suasana Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Dalam rangka mendukung Pembangunan.

Untuk mencapai maksud tersebut tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota Palangka Raya yang ada saat ini sebanyak 38 orang Pegawai Negeri terdiri dari ;

Tingkat Pendidikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

1. Pegawai Negeri Sipil



2. Jumlah pegawai laki-laki dan perempuan

No	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	25 Orang	13 orang	38 orang

Masukkan aset skpd beserta nilainya (daftar peralatan Badan Kesbangpol)

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pada bagian ini berisi tentang tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis periode 2 seperti yang dilampirkan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pengembangan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya menemukan beberapa tantangan, antara lain :

- Euforia berpolitik yang tidak dilandasi kode etik dan kesadaran tanggung akibat dari Pemilu langsung
- Melemahnya toleransi dalam hubungan sosial
- Meningkatnya potensi konflik dalam budaya sosial

- d. Dominasi pengangguran masih tinggi mewarnai pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang memungkinkan meningkatnya kasus kriminalitas.
- e. Krisis multi dimensi belum dapat diatasi dengan tuntas.
- f. Isuterrorisme dan radikalisme masih kuat mewarnai kehidupan masyarakat dengan persepsi yang berbeda-beda.
- g. Fanatisme kepartaian yang memicu ketidak harmonisan antara Partai yang satu dengan Partai lainnya.
- h. Kesenjangan sosial masih merebak dan belum ditemukan pola untuk mengatasinya.

Disamping tantangan terdapat juga peluang yang bisa menjadi kekuatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, antara lain :

1. Adanya kebijakan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan.
2. Adanya komitmen untuk menegakan disiplin aparatur pemerintah daerah yang ditunjang dengan adanya penerapan sanksi yang tegas serta kritisnya masyarakat dalam menangani masalah hukum kepegawaian terutama dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menciptakan good governance.
3. Adanya peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai serta peningkatan kualitas SDM organisasi melalui pendidikan dan atau pelatihan.
4. Adanya nilai Falsafah Hidup Budaya Huma Betang

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya:

1. Kurangnya profesionalisme kerja dalam rangka pelaksanaan program dan operasional menghadapi masyarakat yang heterogen serta mengantisipasi berbagai kemungkinan mobilitas kependudukan.
2. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan
3. Kurangnya SDM yang kompeten.
4. Rendahnya tingkat disiplin anggota masyarakat.
5. Kecerdasan sebagian anggota masyarakat masih rendah sehingga mudah dipengaruhi kepada suatu sikap apatisme, fanatisme dan sikap destruktif kolektif.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Di bidang Sosial ketahanan ekonomi, sosial dan budaya visi dan misi dari kepala dan wakil kepala daerah terpilih adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, dinamis, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi filosofi huma betang. Jika ditelaah lebih lanjut visi sekaligus misi kepala dan wakil kepala daerah mengarah pada perwujudan meningkatnya kehidupan sosial budaya yang harmonis dengan menjunjung tinggi filosofi huma betang antara lain :

Faktor penghambat :

- a. Kondisi sosial ekonomi yang masih rendah sehingga mudah terpropokasi.
- b. Kesenjangan sosial yang tinggi dalam kehidupan.
- c. Politisasi konflik yang tidak tertangani dengan baik.
- d. Perubahan-perubahan dalam skala global yang berlangsung cepat tanpa disikapi dengan baik.
- e. Jenis-jenis konflik yang berkembang dalam masyarakat yang tidak dapat diidentifikasi secara baik dan tepat.

Faktor pendorong :

- a. Faktor kelembagaan
- b. Faktor kemampuan Organisasi dan SDM serta Kepemimpinan.
- c. Faktor peraturan dan perundang-undangan
- d. Faktor tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat.

3.3 Telaah Renstra Kota Palangka Raya

Pada bab ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya akan mengemukakan adanya faktor penghambat dan faktor pendorong dari RENSTRA antara lain :

Faktor pendorong ditinjau dari RENSTRA adalah :

1. Faktor kelembagaan
2. Faktor kemampuan Organisasi dan SDM serta Kepemimpinan.
3. Faktor peraturan dan perundang-undangan
4. Faktor tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Faktor penghambat ditinjau dari RENSTRA adalah :

- a. Kondisi sosial ekonomi yang masih rendah sehingga mudah terpropokasi.
- b. Kesenjangan sosial yang tinggi dalam kehidupan.
- c. Politisasi konflik yang tidak tertangani dengan baik.
- d. Perubahan-perubahan dalam skala global yang berlangsung cepat tanpa disikapi dengan baik.
- e. Jenis-jenis konflik yang berkembang dalam masyarakat yang tidak dapat diidentifikasi secara baik dan tepat.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam manajemen lingkungan hidup yang ditawarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 yang merupakan salah satu pilar pembangunan untuk mencapai keberhasilan, akan diidentifikasi dalam bentuk asumsi dari sudut pandang kesatuan bangsa dan sosial politik yang akan diarahkan melalui kolaborasi system manajemen lingkungan yang diartikan sebagai suatu proses penggunaan Sumber Daya Masyarakat, Sosial Politik secara efektif untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan.

Pada dasarnya ditengah kehidupan yang semakin maju tidak akan terlepas dari tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks serta berbeda bentuk dan implementasinya dari waktu ke waktu atau dari generasi ke generasi berikutnya. Untuk kepentingan itu penguasaan pengetahuan manajemen lingkungan dan kemampuan penerapannya secara baik dan benar merupakan faktor penentu bagi keberhasilan.

Tata kehidupan dan perilaku kelompok masyarakat dan organisasi Politik/Kemasyarakatan dapat dipahami melalui manajemen lingkungan sekaligus kemampuan mengelola Sumber Daya Masyarakat.

Sistem manajemen lingkungan, fungsi dan tata nilai yang didukung berbagai komponen dalam masyarakat melalui jejaring kerja yang efektif, koordinatif, sarasi dan seimbang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Semangat kedaerahan berkembang pesat ketimbang semangat persatuan dan kesatuan bangsa, perbedaan SARA bukan lagi sebagai kondisi warisan Bangsa tetapi berubah menjadi salah satu ancaman potensial bagi eksistensi.

Perumusan wawasan kebangsaan sudah begitu nyata semakin mengemukakan ditandai dengan beberapa indikasi antara lain :

- a. Terkait dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 serta tahapan pemilihan Gubernur Kepala Daerah tahun 2015, terutama berkaitan dengan konstelasi politik dan aspek ketertiban dan keamanan dalam negeri.
- b. Meningkatnya potensi konflik di bidang tata ruang dan pertanahan akibat belum selesainya penetapan Perda RTRWK
- c. Potensi konflik sosial dan budaya dalam bentuk unjuk rasa akibat permasalahan yang muncul di wilayah hinterland yang dapat berimbas ke Kota Palangka Raya, mengingat posisi Kota Palangka Raya sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada kondisi dan situasi tertentu terjadi unjuk rasa, protes, penggalangan masa dari luar wilayah Kota Palangka Raya.

Indikasi tersebut diatas tak terkecuali tersemayam di wilayah Kota Palangka Raya dan sekitarnya dimana apabila dibiarkan berkembang dan tidak diantisipasi dini maka tidak mustahil akan mengancam ikatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bertolak dari latar belakang tersebut diatas maka sudah menjadi tugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya untuk mengambil berbagai langkah strategis secara terencana, terkoordinasi dan berkesinambungan dari tahun berikutnya yang digariskan secara umum dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai kristalisasi Visi, Misi dan RENSTRA Kota Palangka Raya serta Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sekaligus penjabaran, sebagai tolok ukur keberhasilan, Perencanaan Program dan Anggaran Tahunan, Bahan evaluasi dan lain sebagainya.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Melalui tahapan-tahapan yang telah dilewati sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah merumuskan Visi-Misi untuk 5 (lima) tahun kedepan.

VISI :

Sesuai dengan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yaitu “GARDA DEPAN MEMPERKOKOH WAWASAN KEBANGSAAN, PEMBAURAN DAN KEWASPADAAN DAERAH BERBASIS FALSAFAH HIDUP BUDAYA HUMA BETANG” Maka Program dan kegiatan Strategis yang Ingin dikembangkan adalah :

Kegiatan pembinaan/fasilitasi terhadap Dinamika Sosial/Politik, Pengawasan terhadap Eksistensi Partai Politik/Ormas, dan Pengkajian Masalah Strategis Sosial Politik.

MISI :

Adapun Misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman kearifan budaya lokal dengan mengedepankan hidup damai, kebersamaan, keberagaman, kesetaraan, toleransi, musyawarah dan mufakat
2. Menjadi acuan dalam mengembangkan nilai kepatuhan dalam tata kelola pemerintahan yang baik
3. Menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang nyaman untuk berkarya dan berprestasi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

1. **Tujuan**

Keberhasilan pembangunan politik selain ditentukan oleh kalangan birokrat, faktor yang juga paling menentukan adalah para elite politik, pemuka masyarakat sebagai tenaga penggerak yang tak ternilai harganya dalam penyaluran aspirasi dan motivasi masyarakat menuju tujuan pembangunan politik yang lebih sehat, bermoral dan beretika, serta santun dalam penyaluran aspirasi sesuai kaidah-kaidah koridor Demokrasi Pancasila.

Untuk mendukung tujuan dengan ini Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah membangun sistem kemitraan dan layanan publik dengan memfasilitasi pembentukan berbagai Forum, Tim, Komunitas antara lain :

- a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- c. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
- d. Forum Bela Negara (FBN)
- e. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
- f. Tim Pemantauan Tenaga Kerja Asing/Ormas Asing/Lembaga Asing
- g. Pembinaan Organisasi Partai Politik di Daerah
- h. Tim Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
- i. Pendaftaran dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

2. **Sasaran**

Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan, maka sasaran dari upaya pembangunan politik diarahkan pada peningkatan peran dan peningkatan intensitas komunikasi timbal balik diantara dan antar Elite Politik, Pemuka Masyarakat, Generasi Muda, Budayawan, Infra dan Supra Struktur Politik.

- a. Meningkatkan sumber daya Manusia termasuk kondisi sosial politik melalui aparaturnya profesional.
- b. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui pembangunan pos jaga dan Posko penanggulangan bencana.
- c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah dan kewaspadaan dini masyarakat.
- d. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda Kota Palangka Raya.
- e. Meningkatkan kerukunan antar Umat Beragama
- f. Mendukung Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015
- g. Menciptakan Komitmen dan Konstitusi terhadap peran sumber daya Masyarakat/sosial Politik.

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya untuk periode 2013-2018 antara lain :

1. Strategi

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Setelah tersusun visi, misi dan tujuan serta sasaran yang jelas, maka langkah selanjutnya adalah penilaian faktor internal dan eksternal Badan Kesbangpol dan Linmas atau lebih sering dikenal dengan Analisis SWOT.

Pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) yaitu untuk melihat kompleksitas permasalahan Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan

ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang.

2. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kesbangpol merumuskan kebijaksanaannya sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kepada Aparatur Wawasan kebangsaan, politik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
2. Melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, politik

Kebijaksanaan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang bermaksud untuk :

- (1) Menentukan secara teliti tentang arah dan bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
- (2) Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.
- (3) Menciptakan kebijaksanaan yang mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat dan pelaksana di Badan Kesbangpol mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**Strategi, Arah dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palangka Raya**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kehidupan sosial budaya yang harmonis dengan menjunjung tinggi filosofi budaya huma betang	Terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
			Terjalannya Pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan
			Berkurangnya jumlah demo yang dilakukan oleh masyarakat
			Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
			Pencegahan dan deteksi dini bencana

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Melalui analisa dan telaah yang telah dilakukan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah menentukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun yang akan datang yang tentunya akan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang dilampirkan pada tabel 5.1

a. Program

3. Dalam rangka implementasi kebijaksanaan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka disusun berbagai program sebagai berikut :
 1. Pelayanan administrasi perkantoran
 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 3. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
6. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakkriminal
7. Pengembangan wawasan kebangsaan
8. Kemitraan pengembangan wawasankebangsaan
9. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
10. Pendidikan Politik Masyarakat
11. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

a. Kegiatan

Secara lebih rinci dalam kaitannya dengan pelaksanaan dari program yang telah ditetapkan, maka langkah dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air danlistrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
11. Penyediaan jasa event palangka fair
12. Pengadaan peralatan gedung kantor
13. Pengadaan infocus
14. Pengadaan peralatan system informasi elektronik
15. Pengadaan sound system
16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
19. Pengadaan umbul-umbul, bendera dan tiang umbul-umbul
20. Pendidikan dan pelatihan formal
21. Pembangunan pos jaga/ronda
22. Posko penanggulangan bencana
23. Operasional penanggulangan bencana
24. Pencegahan konflik agama
25. Sosialisasi pencegahan konflik sengketa tanah
26. Sosialisasi dan apel siaga menghadapi pemilihan legislatif dan presiden Tahun 2014
27. Pengadaan perlengkapan hansip linmas kota Palangka Raya dalam rangka pemilihan anggota legislative dan presiden
28. Melaksanakan pertemuan unsur KOMINDA Kota Palangka Raya
29. Melaksanakan pelatihan deteksi dini
30. Pembentukan tim koordinasi pemantauan orang asing dan lembaga asing di Kota Palangka Raya.
31. Monitoring dan evaluasi kegiatan forum kerukunan dalam kehidupan umat beragama (FKUB)
32. Sosialisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda
33. Melaksanakan sosialisasi pembauran kebangsaan
34. Ikrar anak bangsa
35. Sosialisasi dan pembentukan pengurus Baru Forum Bela Negara (FBN) Kota Palangka Raya

36. Melaksanakan monitoring, konsultasi, evaluasi dan penyelenggaraan
37. Pengawasan dan pendataan organisasi politik
38. Pengawasan dan pendataan Ormas, LSM, Yayasan dan Paguyuban
39. Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik di wilayah Kota Palangka Raya
40. Tim verifikasi kelengkapan administrasi partai politik di wilayah Kota Palangka Raya
41. Silaturahmi dengan tokoh masyarakat, agama, pemuda, ormas, yayasan dan paguyuban
42. Dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu legislative dan pemilihan presiden
43. Pendataan dan pengawasan orang asing

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

RENSTRA

Pada bab ini telah dirumuskan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RENSTRA dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai komitmen dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam mendukung RENSTRA yang dilampirkan pada tabel 6.1

BAB. VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018 berisikan rencana yang bersifat acuan dasar dan merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Renstra Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018

Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam menghadapi kondisi masyarakat dinamis dan berbagai perkembangan/perubahan guna diarahkan pada semakin terkendalinya suasana kondusif serta semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam rangka penyusunan rencana operasional yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Skala prioritas pembangunan masyarakat, Kesatuan Bangsa/Politik
2. Penyediaan Biaya/Alokasi Dana yang relatif mencukupi
3. Kredibilitas pengawasan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 ini merupakan konsekuensi dambaan atas keberhasilan dalam lima tahun kedepan, namun sangat ditentukan dari dukungan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan untuk mencapai visi dan Misi Organisasi.

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

**Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Kota Palangka Raya**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp.	target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1																	
1	19																
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri															
		Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio pos kamling per jumlah Rukun Tetangga (%)	92/666	340/666	440.500.000	588/666	800.000.000	836/666		1.084/666		1332/666		1332/666		
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah linmas per jumlah penduduk	0,01	0,01	-	0,01	500.000.000	0,01		0,01		0,012		0,012		

			Program Pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan	- Kegiatan Pembinaan politik daerah - Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	10 10	30 30	724.174.200	50 50	724.174.200	70 70	800.000.000 90	900.000.000	110 110	1000.000.000	110 110	1000.000.000		
			Program pendidikan politik masyarakat	Jumlah demo	8	8	1.294.151.000	6	1.300.000.000	4	1.300.000.000	2	1.300.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Angka kriminalitas	229	229	-	172		115		58		0		0		
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sosialisasi/ Pelatihan	4	4	100.000.000	10	100.000.000	16	200.000.000	20	200.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi kinerja Sasaran awal RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja akhir RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
	Rasio pos kamling per jumlah Rukun Tetangga	92/666	340/666	588/666	836/666	1.084/666	1332/666	1332/666
	Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk	0,01	0.01	0.01	0.01	0.01	0,012	0,012
	- Kegiatan Pembinaan politik daerah	10 org	30 org	50 org	70 org	90 org	110 org	110 org
	- Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	10 org	30 org	50 org	70 org	90 org	110 org	110 org

